

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEBO

NAJWA SYAUQI AURELLIA
2100874201157

Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di Kabupaten Tebo, khususnya pada kasus penggelembungan suara dalam Pemilu 2024. Kasus tersebut melibatkan penyelenggara Pemilu yang melakukan manipulasi rekapitulasi suara melalui aplikasi SIREKAP. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta integritas penyelenggara Pemilu di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu di Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, politik uang, lemahnya integritas penyelenggara, dan keterbatasan sarana penegakan hukum. Penegakan hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah berjalan sesuai aturan, namun masih terkendala waktu penanganan perkara yang singkat, koordinasi yang belum maksimal, serta adanya kepentingan politik lokal. Kesimpulannya, penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kabupaten Tebo sudah dilaksanakan, tetapi efektivitasnya masih rendah. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi hukum bagi masyarakat agar tercipta Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Gakkumdu, Kabupaten Tebo.

LAW ENFORCEMENT OF ELECTION CRIMES IN THE JURISDICTION OF TEBO REGENCY

NAJWA SYAUQI AURELLIA
2100874201157

Department of Law
Faculty of Law
Batanghari University Jambi

ABSTRACT

This study discusses law enforcement against election crimes in Tebo Regency, particularly in the case of vote inflation in the 2024 General Election. The case involved election organizers who manipulated vote recapitulation through the SIREKAP application. This reflects the weakness of supervision and integrity of election organizers at the regional level. The research method used is empirical juridical with a socio-legal research approach. Data were obtained through literature studies, interviews with law enforcement officials (Bawaslu, Police, Prosecutors), and field observations. The results show that election crimes in Tebo Regency are influenced by low public legal awareness, money politics, weak integrity of organizers, and limited law enforcement facilities. Law enforcement through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) has been carried out in accordance with regulations, but it is still constrained by short case handling periods, suboptimal coordination, and local political interests. In conclusion, law enforcement of election crimes in Tebo Regency has been implemented, but its effectiveness remains low. Improved inter-agency coordination, stricter supervision, and legal education for the public are required to ensure fair, honest, and integrity-based elections.

Keywords: Law Enforcement, Election Crimes, Bawaslu, Gakkumdu, Tebo Regency.